

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM
MEMUTUS PERKARA SENGKETA HAK ATAS TANAH
(Studi Pada Putusan No. 10/PDT.G/2020/PN.Mgl
Di Pengadilan Negeri Menggala)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Persyaratan
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh

**FEBRIYANI ANISA PUTRI
NPM. 1721020184**

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM
MEMUTUS PERKARA SENGKETA HAK ATAS TANAH
(STUDI PADA PUTUSAN NOMOR 10/PDT.G/2020/PN.MGL
DI PENGADILAN NEGERI MENGGALA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Persyaratan

**Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

FEBRIYANI ANISA PUTRI

NPM : 1721020184

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. KH. Khairuddin, M.H

Pembimbing II : Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443H/2021M**

ABSTRAK

Putusan No. 10/Pdt.G/2020/Pn.Mgl merupakan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Menggala tentang sengketa kepemilikan hak atas tanah. Penggugat menggugat tanah seluas 6 Ha/ enam puluh ribu meter bujur sangkar yang telah dikuasai oleh penggugat selama lebih dari 40 tahun, dengan dalil gugatan penyerobotan tanah dan penguasaan bidang tanah. Dalam gugatannya penggugat menuntut tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa tanah tersebut. Penggugat juga meminta sita jaminan atas tanah sengketa tersebut. Namun, Majelis Hakim menolak gugatan penggugat seluruhnya dan menghukun penggugat untuk membayar biaya perkara. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkara No. 10/Pdt.G/2020/Pn.Mgl? serta Bagaimanakah Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Hakim Terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkara Putusan No. 10/Pdt.G/2020/Pn.Mgl? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan No. 10/Pdt.G/2020/Pn.Mgl.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reaserch*). Sifat penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat *deskriptif analisis*, yakni menggambarkan atau menjelaskan secara tepat mengenai pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara No.10/Pdt.G/2020/Pn.Mgl mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah serta menggambarkan bagaimana pandaagan fiqh siyasah mengenai putusan No. 10/Pdt.G/2020/Pn.Mgl terkait sengketa kepemilikan hak atas tanah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa putusan No.10/Pdt.G/2020/Pn.Mgl dirasa hakim telah sesuai dengan pertimbangannya untuk mengambil keputusan, Untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh penggugat. Karena semua dalil-dalil gugatan tentang kepemilikan hak atas tanah sengketa tersebut, tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh penggugat dalam persidangan. Menurut Fiqh Siyasah putusan No.10/Pdt.G/2020/Pn.Mgl telah sesuai, dimana dalam ruang lingkup Fiqh Siyasah peraturan mengenai kekuasaan kehakiman telah dibahas dalam *Siyasah Qodhaiyyah* yang bertujuan menyelesaikan, menunaikan dan memutus atau membuat suatu ketetapan. Sehingga masyarakat mendapat keadilan khususnya tegugat dalam perkara tersebut.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Hakim Dalam Memutus Perkara Sengketa Hak Atas Tanah (Studi Pada Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/Pn.Mgl)

Nama : Febriyani Anisa Putri

Npm : 1721020184

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syariah


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam siding Munaqosah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 06 Juli 2021

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. KH. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002


Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.
NIP. 197504282007101003

Ketua Jurusan


Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Hakim Dalam Memutus Perkara Sengketa Hak Atas Tanah (Studi Pada Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/Pn.Mgl)" oleh : Febriyani Anisa Putri, NPM: 1721020184, Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Syari'ah pada Hari: Selasa/ 06 Juli 2021.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.

Sekretaris : Muhammad Jayus, M.H.I.

Penguji Utama : Dr. H. A. Kumedi Jafar, S.Ag., M.H.

Penguji I : Dr. H. Khoirudin, M.H.

Penguji II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**



Dr. H. Khoirudin, M.H.
NIP.196210211993031002

MOTTO

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ
أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا
فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْتُمْ أَوْ نَعَرَضُوا فَلِإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An Nisa [4]:135)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamin. Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Penyayang, dengan cinta kasih Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Papa dan mama tercinta, Desmi Zainal dan Tria Maryani, yang telah berjuang mendidik saya sampai sarjana. Terimakasih karena Papa dan mama telah memberikan yang terbaik untuk anakmu ini, berkat doa-doa dan perjuangan kalian, akhirnya saya dapat menyelesaikan kuliah saya.
2. Kakak dan Adik-Adik tercinta, Septri Yani Puspita Wati, Anuar Hidayat dan Hamijar Zudin, terimakasih atas semua pertolongan dan dukungan kalian selama ini yang sangat berarti. Bersyukur memiliki saudara-saudara seperti kalian.
4. Seluruh keluarga besar saya, Kakek, Jedi, Dati, Siti, Binda, Ayah, Wak Neti, Masu, Iyak, Wak Nelly, Papi, dan Minan serta para sepupu-sepupu saya yang tidak bisa disebutkan semuanya. Terimakasih karena selalu mendukung dan memberikan semangat untuk icik, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Saudara-saudara saya keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2017, khususnya kelas F, Mauli, Gita, Priesti, Rani, Susi, Alma, Pipit, Norma, Riski, Wahab, Rendi, Agus, semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih telah berjuang bersama-sama di kelas F dan memberikan semangat, motivasi dalam mencapai keberhasilan saya.
7. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakan saya dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Febriyani Anisa Putri, lahir pada tanggal 4 Maret 1999 di Bandar Lampung. Anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Desmi Zainal dan Ibu Tria Maryani. Beralamat di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

1. Penulis mulai menempuh pendidikan dasar di SDN 1 Campang Raya Bandar Lampung pada tahun 2006.
2. Penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 31 Bandar Lampung pada tahun 2011. Selama duduk dibangku SMP penulis menjadi anggota Rohis.
3. Pendidikan menengah atas ditempuh penulis di SMA Yadika Bandar Lampung pada tahun 2014. Selama penulis menempuh pendidikan penulis aktif di bidang ekstrakurikuler KIR (karya Ilmiah Remaja).
4. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'yyah)

Bandar Lampung, 6 Juli 2021

Febriyani Anisa Putri
1721020184

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul **“ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA SENGKETA HAK ATAS TANAH (STUDI PADA PUTUSAN NOMOR 10/PDT.G/2020/PN.MGL DI PENGADILAN NEGERI MEGGALA)”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang Insyaalloh mendapat syafaat di hari akhir, aamiin.

Dalam menyelesaikan Skripsi penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. KH. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Hervin Yoki Pradikta, M.H.I, selaku Sekretaris Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

5. Bapak Dr. KH. Khairuddin, M.H. selaku pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing dan mengoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini selesai.
6. Bapak Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. selaku pembimbing II yang sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada segenap keluarga civitas akademika, dosen, dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
8. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesainya skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Siyasah Angkatan 2017, khusus Siyasah F yang selalu mendorong dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi dari awal hingga akhir sampai
10. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.

Bandar Lampung, 6 Juli 2021

Febriyani Anisa Putri
1721020184

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
ABSTRAK	II
SURAT PERNYATAAN	III
PERSETUJUAN	IV
PENGESAHAN.....	V
MOTO	VI
PERSEMBAHAN	VII
RIWAYAT HIDUP.....	VIII
KATA PENGANTAR	IX
DAFTAR ISI	XI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	
C. Fokus Penelitian.....	12
D. Rumusan Masalah.....	13
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Manfaat Penelitian.....	13
G. Kajian Pustaka Terdahulu Yang Relevan	14
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Putusan Hakim.....	23
1. Pengertian Putusan Hakim	23
2. Macam-Macam Putusan Hakim	25
3. Susunan Dan Isi Putusan	27
4. Asas-Asas Putusan Pengadilan	30
5. Pembuktian Dan Daluwarsa	32
6. Alat-Alat Bukti Dalam Perkara Perdata.....	37
B. Sengketa Pertanahan	46
1. Pengertian Sengketa Tanah	46

2. Sebab-Sebab Sengketa Tanah	47
3. Penyelesaian Sengketa Pertanahan	50
C. Kajian Fiqh Siyasah	57
1. Pengertian Fiqh Siyasah	57
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	59
3. Pembahasan Siyasah Qodhaiyyah	61
BAB III DESKRIPSI PERKARA NO. 10/PDT.G/2020/PN.MGL TENTANG SENGKETA HAK ATAS TANAH	65
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Menggala.....	65
1. Sejarah Pengadilan Negeri	65
2. Pengadilan Negeri Menggala.....	72
a. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Menggala	72
b. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Menggala	73
c. Struktur Organisasi.....	74
B. Deskripsi Perkara No. Pdt.G/2020/Pn.Mgl	75
C. Putusan Hakim No. 10/Pdt.G/2020/Pn.Mgl Tentang Sengketa Hak Atas Tanah	76
BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NO. 10/PDT.G/2020/PN.MGL TENTANG SENGKETA HAK TAS TANAH	87
A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Hak Atas Tanah Studi Pada Putusan No. 10/Pdt.G/2020/Pn.Mgl	87
B. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Hakim Tentang Hak Atas Tanah Studi Pada Putusan No. 10/Pdt.G/2020/Pn.Mgl	91
BAB V PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul Skripsi ini adalah :

“Anlisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Hakim Dalam Memutus Perkara Sengketa Hak Atas Tanah (Studi Pada Putusan No.10/pdt.G/2020/PN.Mgl Di Pengadilan Negeri Menggala)”. Adapun beberapa istilah yang perlu untuk dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut :

1. Analisis Fiqh Siyasah

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹

Sedangkan Fiqh Siyasah adalah salah satu hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²

Jadi dapat disimpulkan Analisis Fiqh Siyasah adalah penguraian dan penelaahan hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

¹Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karya, 2011), 7.

²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 4.

2. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara. Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan.

3. Sengketa Tanah

Sengketa tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Dalam kehidupan masyarakat, sengketa tanah ini juga sering terjadi dalam hal peralihan hak atas tanah seperti jual beli tanah, ataupun perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan tanah.³

4. Kepemilikan Hak Atas Tanah

Kepemilikan adalah kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimilikinya secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi.⁴ Hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi yang terbatas. berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.⁵

Jadi Kepemilikan hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada (perseorangan, sekelompok, orang secara bersama-sama atau

³ Angger Sigit Pramukti dan Erdha Widayanto, *Awas Jangan Beli Tanah Sengketa* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), 137.

⁴ (Sumber : id.m.wikipedia.org diakses pada tanggal 11 November 2020)

⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 1994), 18.

badan hukum) untuk memakai, dalam arti menguasai, menggunakan, dan mengambil manfaat dari bidang tanah tertentu.

5. Perkara Putusan NO. 10/PDT.G/2020/PN.MGL

Pekara putusan yang berisikan sengketa tanah terkait kepemilikan hak atas tanah seluas 6 (enam) Ha/ enam puluh meter bujur sangkar, dalam perkara gugatan antara Pesirah Bin Ahmad Marzuki sebagai penggugat dan Abdul Hamid Bin Tajib sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Menggala.

6. Pengadilan Negeri Menggala

Pengadilan Negeri Menggala terletak di Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda, Menggala Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.

Dari beberapa istilah yang penulis jelaskan diatas, maka yang dimaksud dari judul skripsi ini adalah suatu kajian yang menganalisis putusan Pengadilan Negeri Menggala tentang sengketa kepemilikan hak atas tanah studi pada putusan No. 10/PDT.G/2020/PN.MGL

B. Latar Belakang Masalah

Sejak lahir manusia membutuhkan tanah untuk berbagai kebutuhan baik untuk keperluan tempat tinggal, usaha pertanian dan lain sebagainya. Tanah adalah faktor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia yang sebagian besar penduduknya menggantungkan kehidupannya dari tanah. Dalam rangka pembangunan nasional demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945, tanah juga merupakan salah satu modal utama, baik sebagai wadah pelaksanaan pembangunan maupun sebagai faktor produksi untuk menghasilkan komoditas-komoditas perdagangan yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Ketentuan-ketentuan dasar mengenai tanah di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria, yang memuat pokok-pokok dari Hukum Tanah Nasional⁶.

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat. kebutuhan tersebut pada kenyataannya tidak sebanding dengan ketersediaan tanah yang ada saat ini, sehingga hal ini secara tidak langsung menimbulkan persaingan banyak pihak untuk mendapatkan tanah. Dari segi harga, tanah termasuk aset yang nilainya tidak akan turun, bahkan cenderung untuk selalu meningkat dari tahun ketahun. Permasalahan di bidang pertanahan saat ini menjadi tanggung jawab pemerintah yang dijadikan salah satu kegiatan dalam program strategis BPN RI dalam percepatan penyelesaian kasus pertanahan.

Penataan ulang struktur dan kebijakan pertanahan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaat sumber daya agraria perlu dilakukan dengan komitmen politik pemerintah yang sungguh-sungguh untuk memberikan arah dan dasar yang jelas dalam suatu kerangka pembaruan agrarian yang berkeadilan, demokrasi dan berkelanjutan. Hal ini mengingat

⁶Sri Winasari, Agus Sukarmadji dan Oemar Moecthar ed, *Politik Hukum Pertanahan*, (Surabaya: Airlangga University Press, Surabaya, 2018) , 2.

begitu banyak dan kompleks permasalahan yang muncul dibidang pertanahan, apabila tidak ditangani dengan benar.⁷

Adapun sumber hukum tanah yang tertulis di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria [Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043];
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak pakai atas Tanah [Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663];
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696];
- e. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah.
- f. Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- g. Peraturan lain sepanjang bersangkutan dengan permasalahan pengaturan tanah.

⁷ Maria Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi* (Jakarta:Kompas, 2006),. 46.

Selain peraturan-peraturan dan Hukum Adat serta Hukum Kebiasaan Baru yang menjadi sumber hukum tanah, ada satu sumber hukum lain yang diakui sebagai sumber hukum tanah, yaitu perjanjian. Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak juga merupakan hukum bagi hubungan konkret yang bersangkutan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam hal ini, Perjanjian tersebut tentu ada batasannya, yaitu khusus dibidang Hukum Tanah, sepanjang perjanjian yang diadakan itu tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan UUPA.

Kasus Pertanahan merupakan sebuah hal yang sering dijumpai saat ini seiring dengan meningkatnya proses jual beli tanah di masyarakat. Tak jarang kasus ini menimbulkan banyak kerugian bagi banyak pihak, baik itu kerugian materil maupun kerugian imateril. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, kasus pertanahan diartikan sengketa, konflik, atau perkara pertanahan yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mendapatkan penanganan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan nasional.

Pengertian sengketa tanah disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/ BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan

Sengketa Pertanahan, selanjutnya disebut PMNA/KBPN 1/1999 yaitu, perbedaan pendapat antara pihak yang berkepentingan mengenai keabsahan suatu hak pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya serta pihak yang berkepentingan yang merasa mempunyai hubungan hukum dan pihak lain yang berkepentingan terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut.⁸ Sengketa pertanahan bisa terjadi dan berdampak luas, baik secara horizontal maupun secara vertikal.

Sengketa vertikal artinya sengketa antara masyarakat dengan pemerintah atau lembaga negara. Sengketa semacam ini masih sangat mungkin terjadi yang disebabkan oleh proses peralihan hak atas tanah dari zaman penjajahan Belanda ke Jepang, kemudian dari Pemerintahan Jepang ke Negara Indonesia tidak terproses secara yuridis dan administrasi yang akibatnya bukti kepemilikan tanah masih ada yang tidak jelas dan kasusnya baru muncul sekarang, dan bila dicari sejarah tanahnya menyambung antara bukti yang satu dengan bukti lainnya. Sedangkan sengketa horizontal adalah persengketaan yang terjadi antar perorangan di masyarakat baik secara pribadi maupun kelembagaan. Penyelesaiannya sebenarnya cukup antara para pesengketa menyelesaikan sendiri, bisa dengan cara konsiliasi (kekeluargaan). Penyelesaian semacam itu juga membutuhkan perhatian yang sangat serius

⁸ Mudakir Iskandar Syah, *Panduan Mengurus Sertifikat dan Penyelesaian Sengketa Tanah* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019), 160.

dan sangat mungkin melibatkan peran pemerintah, baik sebagai mediator maupun sebagai litigator.

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh sebuah negara adalah menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas tanah (bagian dari) bumi dan ruang angkasa, khususnya kaitan dengan diatas bumi yang dikonkritkan dengan penerbitan sertifikat sebagai alat bukti yang dikuasai sesuai dengan pasal 19 UUPA, bahwa pemerintah mengadakan pendaftaran tanah yang bersifat *Recht Cadaster*⁹. Pendaftaran tanah¹⁰ merupakan persoalan yang sangat penting dalam UUPA, karena pendaftaran tanah merupakan awal dari proses lahirnya sebuah bukti kepemilikan hak atas tanah. Meskipun telah mendapat pengakuan dalam UUPA, sertifikat belum menjamin kepastian hukum pemiliknya karena dalam peraturannya sendiri memberi peluang dimana sepanjang ada pihak yang merasa memiliki tanah dapat menggugat pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat secara keperdataan ke Peradilan Umum, atau menggugat kepala BPN/ Kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, atau gugatan yang menyangkut teknis administrasi penerbitnya.¹¹

⁹Recht Cadaster adalah pendaftaran tanah yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah, sedangkan bagi tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat didaftarkan dengan tujuan menetapkan siapa yang berkewajiban membayar pajak atas tanah.

¹⁰Dalam Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa: Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satu-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

¹¹Rusmadi Murad, *Administrasi Pertanahan Pelaksanaan Dalam Praktek* (Bandung: Mandar Maju 1997), 46.

Di Pengadilan Negeri Menggala terdapat putusan perkara No. 10/PDT/G/2020/PN.MGL yang berisi kumulasi sengketa, yaitu kumulasi antara sengketa pertanahan atau sengketa tanah yang merupakan pokok gugatan yang diajukan penggugat di pengadilan. Pokok gugatan dalam perkara tersebut ialah Penggugat menggugat tanah seluas 6 (enam) Ha/ enam puluh meter bujur sangkar yang dikuasai oleh tergugat selama lebih dari 40 tahun, dengan dalil gugatan penyerobotan tanah dan penguasaan bidang tanah, dengan mendasarkan kepada surat warisan yang menerangkan telah mewariskan tanah tersebut dari Ali Gelar Setan Ratu Merga kepada Ahmad Gelar Setan Seluruh, yang mana adalah orang tua dari penggugat, serta dengan dalil-dalil gugatan lainnya. Dalam hal ini tergugat memberikan pernyataan bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh tergugat dari ayah penggugat yaitu Alm.Ahmad Gelar Setan Seluruh sebagaimana Surat Jual Tahun 1975.

Dalam perkara ini, hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral dan profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam wujud putusannya, meski juga harus menggunakan hati nurani, hakim tidak boleh melepaskan diri dari nilai-nilai yang berlaku didalam masyarakat. Putusan hakim harus selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan.¹²

¹²Lihat Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim harus mampu merefleksikan setiap Pasal yang terkait dengan fakta kejadian yang ditemukan dipersidangan kedalam putusan hakim yang mengandung nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai konstitusi dasar dalam UUD 1945. Sehingga setiap putusan hakim memancarkan pertimbangan nilai filosofis tinggi. konkritnya ditandai oleh karakter putusan yang berketuhanan, berperikemanusiaan, menjaga persatuan, penuh kebajikan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam khazanah keilmuan Islam, Allah Swt. memerintahkan seorang hakim untuk memberikan suatu putusan yang adil, sebagai penegak keadilan kepada masyarakat karena hal tersebut merupakan keutamaan tugas seorang hakim, seperti firman Allah Swt sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An Nisa [4]:58)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”(QS. An Nisa [4]:135)

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif. Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBG, setelah pemeriksaan selesai, maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Pemeriksaan dianggap telah selesai apabila telah melalui tahap jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak.

Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim harus memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sumber hukum yang dapat ditetapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis

(Hukum Adat), Putusan Desa, Yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli. Dalam praktek peradilan perdata dikenal sumber hukum berupa *burgerlijk wetboek (BW)* yang terdiri dari 1993 pasal. BW tersebut berdasarkan Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945 (amandemen) masih berlaku hingga saat ini. BW berlaku untuk sebagian warga negara Indonesia yaitu : 1) mereka termasuk golongan eropa; 2) mereka yang termasuk golongan TiongHoa dengan beberapa pengecualian dan tambahan seperti termuat dalam Lembaran Negara Tahun 1917-129 (lampiran II); dan 3) mereka yang termasuk golongan Timur Asing selain TiongHoa dengan kekecualian dan penjelasan seperti termuat dalam Lembaran Negara Tahun 1924-556 (lampiran I). Sementara itu golongan Bangsa Indonesia Asli menggunakan hukum adat yang sejak dahulu telah berlaku di kalangan rakyat, yang sebagian besar masih belum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat, mengenai segala soal dalam kehidupan masyarakat.

Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul :

“Anlisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Hakim Dalam Memutus Perkara Sengketa Hak Atas Tanah (Studi Pada Putusan No. 10/pdt.G/2020/PN.Mgl Di Pengadilan Negeri Menggala)”.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka yaang menjadi fokus penelitian ini, analisis fiqh siyasah terhadap putusan hakim dalam memutus perkara sengketa hak atas tanah studi pada putusan No. 10/pdt.G/2020/PN.Mgl di Pengadilan Negeri Menggala.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa tanah terkait kepemilikan hak atas tanah studi pada putusan No. 10/PDT.G/2020/PN.MGL?
2. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap putusan hakim terkait kepemilikan hak atas tanah studi pada putusan No. 10/PDT.G/2020/PN.MGL ?

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui pertimbangan seorang hakim dalam memutus perkara kepemilikan hak atas tanah studi pada putusan No, 10/PDT.G/2020/PN.MGL.
 - b. Mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap putusan hakim terkait kepemilikan hak atas tanah studi pada putusan No. 10/PDT.G/2020/PN.MGL

F. Manfaat Penelitian

- A. Dari aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian tentang Hukum Perdata khususnya dibidang sengketa tanah, serta sebagai bahan pembahasan bagi ilmu pengetahuan Fakultas Syari'ah pada umumnya dan pada penulis khususnya.

B. Dari aspek praktis, memberikan jawaban atas masalah yang diteliti, kemudian dapat mengembangkan pola pikir, penalaran dan pengetahuan penulis dalam menyusun suatu penulisan hukum.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Guna pembahasan yang lebih komprehensif, peneliti juga melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian yang lebih dahulu ditulis baik berupa skripsi maupun tesis yang masih ada hubungan dan relevansinya dengan penelitian ini.

Pertama adalah skripsi yang ditulis oleh Eko Mulyono (2017) yang berjudul "Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Putusan No. 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg)"¹³. Skripsi ini berisikan tentang sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga. Putusan No.1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg merupakan putusan tentang wanprestasi akad murabahah. Penggugat menggugat Para Tergugat yang merupakan pasangan suami istri dengan tuduhan telah melakukan wanprestasi akad jual beli murabahah no: 43. Dalam gugatannya, Penggugat menuntut Para Tergugat untuk membayar harga pokok barang beserta margin keuntungan, denda, biaya kunjungan dan biaya kuasa hukum. Penggugat juga meminta sita jaminan atas tanah pekarangan milik Para Tergugat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi putusan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah

¹³ Eko Mulyono, "Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Putusan NO. 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg)" (Skripsi, Purbalingga: IAIN Salatiga, 2017), 12.

yuridis normatif. hasil penelitian skripsi ini adalah pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus Putusan No. 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg ini adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Herzien Inlandsch Reglement (HIR). Terhadap pertimbangan hukum oleh hakim tersebut, penggunaan UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas kuranglah tepat sebab undang-undang tersebut telah diganti dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Sementara terhadap penggunaan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, KHES dan HIR sebagai pertimbangan hukum oleh hakim sudahlah tepat.

Kemudian, Skripsi yang ditulis oleh Febra Anugrah Pratama (2020) yang berjudul "Analisis Putusan Hakim No.5/Pdt.G/2017/Pn.MNA Kasus Sengketa Tanah Di Desa Gelumbang Kabupaten Bengkulu Selatan"¹⁴. Tujuan peneliti dalam skripsi ini adalah mengetahui dasar pertimbangan hakim dan akibat dalam memutus perkara Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Mna Dalam Kasus Sengketa Tanah di Desa Gelumbang Kabupaten Bengkulu Selatan. metode yang digunakan adalah hukum normative dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan Bahwa putusan pengadilan Negeri Manna

¹⁴ Febra Anugrah Pratama, "Analisis Putusan Hakim No.5/Pdt.G/2017/Pn.MNA Kasus Sengketa Tanah Di Desa Gelumbang Kabupaten Bengkulu Selatan" (Skripsi, Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2020), 10.

belum memenuhi tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan dan akibat yang ditimbulkan bagi penggugat maupun tergugat adalah pengalihan hak atas tanah yang telah digarap oleh penggugat selama kurang lebih 7 tahun kepada tergugat. Yang secara yuridis telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrah) dan tidak ada upaya hukum yang dilakukan dari pihak penggugat. Putusan hakim Pengadilan Negeri Manna Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Mna Kasus Sengketa Tanah Di Desa Gelumbang Kabupaten Bengkulu Selatan, belum sesuai dengan ketentuan dan tujuan hukum karena yang menjadi dasar pertimbangan belum cukup kuat untuk memutus perkara.

Dan yang terakhir, Tesis yang ditulis oleh Yesicha Cristianita Ginting (2016) yang berjudul "Analisis Kasus Sengketa Keperdataan Kepemilikan Tanah Yang Bersertifikat Ganda (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe NOMOR 30/PDT.G/2009/PN.KBJ)".¹⁵ Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 30/Pdt.G/2009/Kbj dimana Ishak Charlie mengajukan gugatan mengenai Pemilikan Tanah yang beritikad Baik dalam putusan ini dimana telah terbit sertipikat ganda dalam satu bidang tanah yang memiliki luas dan batas-batas yang berbeda dan Ishak Charli menggugat bahwa telah membeli tanah tersebut dengan prosedur yang telah ada. Dimana dalam pendaftaran hak atas tanah melihat riwayat tanah yang dimiliki seseorang tersebut dalam penerbitan sertipikat. Karena Ishak Charli mengajukan

¹⁵ Yesicha Cristianita Ginting, "Analisis Kasus Sengketa Keperdataan Kepemilikan Tanah Yang Bersertifikat Ganda (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe NOMOR 30/PDT.G/2009/PN.KBJ)" (Tesis, Medan: Universitas Sumatera Utara Medan, 2016), 8.

gugatan mengenai Pemilikan Tanah beritikad baik maka dalam hal inilah ranah Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk memutuskan perkara tersebut. Jenis Penelitian ini adalah penelitian normatif, Sifat Penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sumber data adalah data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Analisis data berdasarkan kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, semua data diungkapkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat umum kemudian dikerucutkan pengungkapan data yang bersifat khusus. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe nomor 30/Pdt.G/2009/Kbj putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima karena tidak lengkapnya subyek yang digugat sehingga Ishak Charlie tidak mendapatkan keadilan dalam gugatan yang digugatnya meskipun telah adanya saksi-saksi maupun dokumen-dokumen yang telah dibuktikan di Pengadilan Negeri, dan dalam hal ini sertifikat yang dimiliki oleh Ishak Charlie telah dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan yang sah diakui oleh PTUN ialah Sertipikat yang dimiliki oleh Syamsuddin Arifin.

Dalam pengamatan peneliti, sudah ada beberapa penelitian baik dalam bentuk skripsi maupun tesis tentang analisis terhadap putusan hakim terkait sengketa pertanahan di berbagai wilayah Indonesia, sama seperti yang peneliti lakukan. Namun skripsi tentang analisis fiqh siyasah terhadap putusan hakim dalam memutus perkara sengketa hak atas tanah (dalam perkara putusan No. 10/Pdt.G/2020/Pn.Mgl di Pengadilan Negeri Menggala) berbeda subjek dan objek kajian dengan penelitian terdahulu.

Peneliti meneliti putusan hakim terkait perbuatan melawan hukum pemalsuan surat jual beli tanah sedangkan peneliti terdahulu meneliti tentang putusan wanprestasi akad murabahah. Peneliti meneliti putusan hakim pengadilan negeri menggala sedangkan peneliti yang disebutkan oleh peneliti diatas tidak ada yang sama terkait lokasi penelitian putusan tersebut dan peneliti juga menambahkan pandangan fiqh siyasah (*fiqh siyasah qodhaiyyah*) yaitu pembahasan mengenai Peradilan termasuk didalamnya membahas tentang seorang hakim yang memutus suatu perkara dalam pandangan Islam, pun berbeda dengan peneliti terdahulu.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan, baik berupa surat putusan, buku-buku, jurnal, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, merupakan penelitian dengan memaparkan seluruh data kemudian menganalisis secara detail sehingga pada akhirnya menghasilkan kesimpulan sesuai pokok permasalahannya.¹⁷

3. Sumber Data

a. Data Primer

¹⁶Susiadi, *Metodologi Penelitian, Edisi 1* (Lampung Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 9.

¹⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 18.

Data primer adalah data utama penelitian atau data yang diperoleh secara langsung (dari tangan pertama), Dalam hal ini surat putusan No.10/PDT.G/2020/PN.MGL yang penulis dapatkan dari tergugat dalam perkara ini langsung, buku-buku atau artikel serta skripsi terdahulu dan pendapat para pakar yang berkaitan dengan judul.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari sumber yang sudah ada, atau data yang berisikan tentang informasi yang menjelaskan dan membahas data primer. yaitu studi pustaka yang berisikan Hukum Acara Perdata, pertimbangan putusan hakim, Hukum Agraria, dan buku-buku tentang sengketa pertanahan di Indonesia serta artikel-artikel yang terkait.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data-data yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sekunder, seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, surat kabar, internet serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran kepustakaan yaitu mencari data mengenai objek penelitian dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variabel tertentu yang berupa catatan dan buku-buku, dilakukan dengan mencari, mencatat, mempelajari dan menganalisis data-data berupa bahan pustaka yang berkaitan dengan judul.

5. Pengelolaan Data

- a. Editing, adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Jadi, untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di pustaka dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbarui.¹⁸
- b. Pendataan data, adalah memberi catatan data yang menyarakan jenis dan sumber data baik itu sumber buku-buku literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Rekontruksi data, adalah menyusun ulang data secara teratur berurutan, logis sehingga mudah sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.¹⁹

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Metode analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang kemudian diuraikan dan berpijak pada landasan teori. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan seorang hakim dalam memutuskan perkara sengketa tanah serta akibat hukum dari putusan tersebut.

¹⁸Burhan Ashshofa, *Metedologi Penelitian Hukum* (JakartaRineke Cipta, 2013), 122-123.

¹⁹Amuruddin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metedologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107.

I. Sistematika Penulisan

Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan ini menjadi terarah, maka peneliti menggunakan sistematika penulisan yang terbagi menjadi lima bab. Susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, berisikan teori-teori putusan hakim yang akan menjabarkan, pengertian putusan hakim, macam-macam putusan hakim, susunan dan isi putusan, asas-asas putusan pengadilan, pembuktian dan daluarsa, serta alat-alat bukti dalam perkara perdata. Lalu teori sengketa pertanahan yang akan menjabarkan antara lain, pengertian sengketa tanah, sebab-sebab sengketa tanah, dan penyelesaian sengketa pertanahan. lalu yang terakhir teori tentang kajian fiqh siyasah, yang pertama tentang pengertian fiqh siyasah, ruang lingkup fiqh siyasah dan pembahasan siyasah qodhaiyyah.

Bab ketiga, mendeskripsikan perkara No. 10/ Pdt.G/2020/PN.MGL berisikan tentang profil Pengadilan Negeri Menggala dan gambaran secara umum tentang perkara NO.10/PDT.G/2020/PN.MGL di Pengadilan Menggala.

Bab keempat, adalah analisis peneliti tentang objek penelitian. Peneliti akan menganalisa putusan NO.10/PDT.G/2020/PN.MGL untuk mengetahui permasalahan dalam sengketa hak atas tanah tersebut, serta untuk mengetahui dasar hukum apa yang dipakai oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan

NO.10/PDT.G/2020/PN.MGL

Bab kelima, merupakan penutup dari penelitian ini. Peneliti akan menyusun kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab sebelumnya, pada bab ini juga berisi jawaban atas pokok permasalahan penelitian. Bab kelima ini ditutup dengan saran-saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses mengajukan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat selesai dan pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut. Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara dan sebagai wakil Tuhan yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan baik peraturan hukum yang tertulis dalam perundang-undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis atau hukum adat.

Arti putusan hakim adalah suatu pernyataan yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.²⁰ Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata. Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis yang harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara serta panitera pengganti yang ikut bersidang.

Untuk mencegah adanya perbedaan antara bunyi putusan yang diucapkan di persidangan dengan yang tertulis, Mahkamah Agung dengan Surat Edaran No. 5/1959 tanggal 20 April 1959 dan No. 1/1962 tanggal 7 Maret 1962 telah menginstruksikan kepada para hakim agar pada waktu putusan pengadilan tersebut diucapkan konsepnya harus sudah disiapkan. Karena jabatannya, ketika bermusyawarah hakim wajib mencukupkan semua alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. Hakim wajib mengadili semua bagian gugatan. Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat.

²⁰ Moh. Taufik Makarou, *Pokok-Pokok Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 124.

2. Macam-Macam Putusan Hakim

Pasal 185 HIR/196 RBG menentukan, putusan yang bukan merupakan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan juga, tidak dibuat secara terpisah, melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan saja. Kedua belah pihak dapat meminta supaya kepada mereka diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan ongkos sendiri. Selanjutnya Pasal 190 (190) HIR/RBG menentukan, bahwa putusan sela hanya dapat diuntakan banding bersama-sama permintaan banding terhadap putusan akhir. Dari ketentuan tersebut, maka dapat dibedakan putusan pengadilan atas 2 macam yaitu:

1. Putusan Sela (*tussen vonnis*)
2. Putusan Akhir (*eind vonnis*)

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Misalnya tergugat mengajukan suatu tangkisan (ekspesi) yang bertujuan agar hakim menyatakan dirinya tidak berkompentensi memeriksa perkara tersebut karena perkara tersebut adalah wewenang pengadilan lain. Dalam hal ini Pasal 136 HIR menentukan, ekspesi yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan, dan ditimbang sendiri-sendiri, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Dari ketentuan ini bahwa putusan

sela terhadap ekspesi tentang kekuasaan hakim harus diambil dan diucapkan terlebih dahulu sebelum diteruskan memeriksa pokok perkara.

Berbeda dengan perkara pidana dimana putusan sela terhadap semua jenis ekspesi dapat diputuskan secara terpisah dari putusan akhir, sedangkan dalam perkara perdata kecuali ekspesi tentang kewenangan mengadili putusan sela tidak dibuat secara terpisah, melainkan hanya dituliskan dalam berita acara pemeriksaan saja.

Dalam hukum acara dikenal beberapa macam putusan sela yaitu:

- a. Putusan *Preparatoir*, yaitu putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir. Sebagai contoh, putusan untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi.
- b. Putusan *Interlocutoir*, yaitu yang isinya memerintahkan pembuktian. sebagai contoh, Putusan untuk memeriksa saksi atau pemeriksaan setempat. Karena putusan ini menyangkut masalah pembuktian, maka putusan *interlocutoir* akan mempengaruhi putusan akhir.
- c. Putusan *Incidentiel*, adalah putusan yang berhubungan dengan insiden yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Contoh, putusan yang memperbolehkan pihak ketiga ikut serta dalam suatu perkara.
- d. Putusan *Provisional*, yaitu putusan yang menjawab tuntutan provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Sebagai contoh, dalam perceraian sebelum pokok perkara diputuskan,

istri meminta untuk dibebaskan dari kewajiban untuk tinggal bersama dengan suaminya, karena suaminya suka menganiaya.

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara pada tingkat pemeriksaan pengadilan, meliputi pengadilan, Pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Putusan akhir menurut sifat amarnya (diktumnya) dapat dibedakan atas 3 macam yaitu:

1. Putusan *Condemnatoir* yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Sebagai contoh, mengadili : menghuku tergugat untuk menyerahkan tanah yang menjadi sengketa kepada penggugat; menghukum tergugat untuk menempati tanah yang menjadi sengketa.
2. Putusan *Declaratoir*, yaitu putusan yang amarnya menyatakan penggugat sebagai pemilik atas tanah sengketa.
3. Putusan *Konstitutif*, yaitu putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan baru. Sebagai contoh, Menyatakan ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.

3. Susunan dan Isi Putusan

Suatu putusan hakim terdiri dari empat bagian yaitu:

1. Kepala Putusan

Setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan KetuhananYang Maha Esa"(Pasal 4 (1) UU. No. 14/1970). Kepala putusan ini memberikan

kekuatan eksekutorial pada putusan. Apabila kepala putusan ini tidak dibubuhkan pada suatu putusan pengadilan, maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut. Di lingkungan peradilan agama tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat "Bismillahirohmannirohim diikuti dengan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Pasal 57 (2) UU No. 7/89 tentang perdilan agama). Sedangkan di lingkungan PTUN tiap putusan juga dimulai dengan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Pasal 109 butir (1) a UU No. 5/1986).

2. Identitas Pihak-pihak yang Berperkara

Sebagaimana biasanha bahwa dalam suatu perkara atau gugatan memiliki sekurang-kurangnya dua pihak yang berperkara yaitu seorang penggugat dan seorang tergugat, maka dalam putusan harus memuat identitas paara pihak, seperti nama, alamat, pekerjaan, nama dari pengacara masing-masing jika para pihak menguasai pada orang lain.

3. Pertimbangan atau Alasan-alasan

Pertimbangan atau alasan-alasan dalam putusan hakim terdiri atas dua bagian yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara dan pertimbangan tentang hukumnya. Pasal 184 HIR/195 RBG/23 UU No. 14/1970 menentukan, bahwa setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata harus memuat ringkasan gugatan dan jawaban dengan jelas, alasan dan dasar putusan, Pasal-pasal serta hukum yang tidak tertulis,

pokok perkara, biaya perkara, serta hadir atau tidaknya pihak-pihak yang berperkara pada waktu putusan pengadilan diucapkan. Meskipun Pasal tersebut telah menentukan bahwa gugatan dan jawaban dimuat secara ringkas saja, namun dalam praktek dapat terjadi seluruh gugatan dan jawaban dimuat dalam putusan. Adanya alasan sebagai dasar putusan menyebabkan putusan memiliki nilai obyektif, selain itu juga memiliki nilai wibawa. Putusan pengadilan yang kurang cukup pertimbangannya merupakan alasan yang cukup untuk mengajukan kasasi dan putusan tersebut harus dibatalkan. Selain itu putusan pengadilan yang didasarkan atau pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan harus dibatalkan.

4. Amar atau Diktum Putusan

Sebagaimana telah dikemukakan dalam pembicaraan isi gugatan salah satu isinya adalah petitum yaitu apa yang diminta dan dituntut supaya diputuskan oleh hakim. Putusan hakim adalah menjawab permintaan atau tuntutan ini, apakah mengabulkan atau menolak gugatan tersebut. Dalam amar ini dimuat suatu pernyataan hukum, penetapan suatu hak, lenyap atau timbulnya keadaan hukum dan isi putusan yang disebut hukuman yang berupa pembebanan suatu prestasi tertentu. Yang paling penting dalam amar atau diktum ialah tentang pokok perkara, yaitu menjadi pokok perselisihan. Dalam diktum ditetapkan siapa yang berhak atau siapa yang benar atas pokok perselisihan tersebut.

4. Asas-Asas Putusan Pengadilan

Agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak mengandung cacat, baik secara formil maupun materil, maka putusan pengadilan harus didasarkan pada asas-asas yang harus diikuti dalam pembentukan putusan pengadilan. Dalam perkara perdata, asas tersebut dijelaskan antara lain dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RGB, dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Putusan Harus Memuat Dasar dan Alasan-alasan yang Jelas dan Terperinci

Menurut asas ini setiap pertimbangan yang disusun oleh hakim dalam membuat putusan, harus memuat dasar dan alasan-alasan yang jelas dan terperinci. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*. Dasar dan alasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan hukum dapat bertitik tolak dari: a) pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan; b) Hukum Kebiasaan; c) Yurisprudensi; 4) doktrin hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis

maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 mewajibkan hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut penjelasan pasal ini, hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.²¹

2. Putusan Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Berdasarkan pada Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG, dan Pasal 50 Rv., putusan pengadilan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Putusan pengadilan tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang.

3. Putusan Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi dari Tuntutan

Berdasarkan pada Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RGB dan Pasal Rv., putusan pengadilan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan melebihi *posita* maupun *petitum*. Hakim gugat, dianggap telah melampaui wewenangnya atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun

²¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika., 2005), 102.

hal itu dilakukan hakim dengan iktikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*) Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan iktikad baik.

4. Putusan Harus Diucapkan di Muka Umum

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau dimuka umum, merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari *asas fair trial*. Menurut *asas fair trial*, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Dengan demikian, prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan, merupakan bagian dari *asas fair trial*. Tujuan Utamanya, untuk menjamin proses peradilan terhindar dari perbuatan tercela (*misbehavior*) dari pejabat peradilan.

5. Pembuktian dan Daluwarsa

1. Pembuktian

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian tampaknya bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di hadapan hakim

atau pengadilan. Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum ilmiah yang harus terbukti apabila pengugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, gugatannya akan dikabulkan.

Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi.²² Dalam soal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah itu pihak penggugat atau sebaliknya, yaitu pihak tergugat. Dengan kata lain hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana akan memikul beban pembuktian. Di dalam soal menjatuhkan beban pembuktian, hakim harus bertindak arif dan bijaksana, serta tidak boleh berat sebelah. Semua peristiwa dan keadaan yang konkrit harus diperhatikan secara seksama olehnya. Selain untuk hal-hal yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, masih terdapat satu hal lagi yang tidak harus dibuktikan, ialah berupa hal-hal atau keadaan-keadaan yang telah diketahui oleh khalayak ramai.

²² I Wayan Suandra, *Hukum Pertanahan Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), 58.

2. Daluwarsa

Menurut Pasal 1946 daluwarsa adalah suatu upaya untuk memperoleh suatu hak atau untuk membebaskan dari suatu kewajiban dalam suatu perikatan karena suatu waktu tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Ada 2 macam kadaluwarsa, yaitu:

- a. Daluwarsa yang menyebabkan seseorang dibebaskan dari suatu kewajiban atau yang menyebabkan hak menuntut seseorang menjadi gugur.
- b. Daluwarsa yang menyebabkan seseorang memperoleh suatu hak tertentu. Kadaluarsa ini mengharuskan adanya etika baik dari orang yang memperoleh hak tersebut.²³

Daluwarsa adalah semacam upaya hukum, yang harus dikemukakan oleh pihak lawan dalam jawabannya. Apabila tidak dikemukakan, maka kadaluwarsaan tidak berlaku secara otomatis. Hakim "harus tetap diam", dan ia tidak diperkenankan untuk menyatakan, bahwa persoalan tersebut atau hak untuk menuntut telah kadaluarsa karena jabatannya. Apabila dikemukakan eksepsi bahwa hak untuk menuntut telah kadaluwarsa, dan alasan tersebut ternyata berdasar, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Apabila eksepsi tersebut dianggap tidak berdasar, eksepsi tersebut akan ditolak dan pokok perkara akan diputus. Dalam hal yang pertama yang

²³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Alumni, 1979), 168.

dijatuhkan adalah putusan akhir, sedangkan dalam hal yang kedua yang dijatuhkan adalah putusan sela.²⁴

Dalam hukum adat tidak dikenal kadaluarsa dalam arti hukum barat, yang dasarnya adalah karena lampaunya waktu tertentu ialah 2,5 tahun atau 20 tahun, lalu timbul daluwarsa, melainkan pengaruh lampau waktu menyebabkan dalil yang menjadi dasar gugat suatu perkara sudah tidak dapat dibuktikan lagi, karena para saksi telah wafat atau pun jika mereka masih hidup, mereka sudah tua dan pikun, sehingga tidak dapat memberi keterangan yang berharga. Dalam praktek sering pula terjadi, bahwa pengaruh lampau waktu, misalnya oleh karena yang bersangkutan telah sekian lama, misalnya 20 tahun lebih, tidak mengajukan sesuatu gugatan atau tidak pula pernah meminta Kepala Desa/Kepala Adat setempat dengan permintaan agar persoalannya "dibereskan", hal itu lalu dianggap sebagai suatu persangkaan Hakim, bahwa sesungguhnya yang bersangkutan tidakberhak atas tanah sengketa tersebut.

Seorang sarjana hukum adat pada sebelum Perang Dunia Ke II, yaitu Prof. Mr. B. Ter Haar Bzn., pada tahun 1936 pernah menulis sebuah karangan ilmiah yang berjudul "Pengaruh lampau waktu terhadap hubungan-hubungan hukum dalam Hukum Adat", mengatakan bahwa baik hak-hak atas tanah, maupun hubungan hukum antara manusia yang satu dengan yang lainnya dapat dipengaruhi oleh lampaunya waktu. Didalam hukum adat yang tidak tertulis hal lampaunya waktu misalnya akan

²⁴ Ibid.,

berakibat bahwa kedudukan yang sebenar-benarnya mengenai sesuatu hal sudah tidak dapat diketahui lagi dengan pasti oleh karenaterjadi "dahulu" sekali, saksi-saksi sudah tidak ada lagi yang dapat memberi keterangan yang berguna. Adalah kesalahan penggugat, karen ia telah sekian lama, tanpa sesuatu alasan yang sah, telah berdiam diri, tidak mengajukan gugatan sehingga ia tidak dapat membuktikan lagi dalil yang menjadi dasar gugatan.

Dalam soal warisan pada umumnya para ahliwaris membiarkan waktu berlaku tanpa meminta pembagian, baru sesuatu waktu oleh timbulah sengketa. Dalam Persoalan semacam ini, Hakim harus berhati-hati dan dapat memberikan bagian yang seharusnya diterima oleh masing-masing apa bila mungkin menyelidiki keadaan yang sebenar-benarnya, untuk dapat memberikan bagian yang seharusnya diterima oleh masing-masing ahli waris. Menurut Prof. Mr. B. Ter Haar Bzn. pengaruh lampau waktu dapat berakibat :

- a. Bahwa suatu hutang oleh karena dibiarkan terlampau lama tidak ditagih lagi, atau hak seorang ahliwaris untuk menjadi hapus oleh karena ia sekian lama telah diam, meskipun ia tidak diikut-sertakan dalam perjanjian jual-beli sawah yang merupakan bagian dari sawah tersebut.
- b. Bahwa oleh karena pengaruh lampau waktu hal itu dianggap sebagai persangkaan untuk menganggap ada atau menganggap telah hilang suatu hak atau suatu fakta hukum. Bukti perlawanan dapat diajukan, akan tetapi kalau tidak diajukan hal tersebut dianggap telah terbukti

c. Bahwa gugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena didasarkan oleh hal-hal yang terjadi dahulu. Perkara telah kadaluwarsa, merupakan perkara lama.

Hukum Agraria dalam persoalan gadai menentukan, bahwa perjanjian gadai pada umumnya hanya dapat berlangsung untuk jangka waktu 7 tahun dan setelah lampau waktu 7 tahun gadai yang bersangkutan berakhir dan setelah lampau waktu 7 tahun gadai yang bersangkutan berakhir tanah pertanian yang digadaikan harus dikembalikan kepada pihak pemilik tanpa pemilik harus membayar uang tebusan lagi. Dalam hal gadai, sebelum gadai berakhir, jangka waktu 7 tahun yang dihitung sejak uang gadainya ditambah, asal perbuatan hukum tersebut dilaksanakan secara tertulis dengan melalui acara yang lazim seperti pada waktu gadai yang pertama dilakukan.

6. Alat-Alat Bukti dalam Perkara Perdata

Alat-alat bukti menurut pasal 284 RBG/164 HIR/1866 KUHPerdara adalah sebagai berikut :

1. Surat

Alat bukti tulisan atau surat diatur dalam Pasal 165-167 HIR/282-305 RBG dan Pasal 1867-1894 KUHPerdara. Alat bukti tulisan atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang bisa dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu. Tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan misalkan huruf latin, huruf arab, huruf kanji dan lain sebagainya. Dengan demikian segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau

meskipun memuat tanda-tanda bacaan tetapi tidak bisa dimengerti, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tulisan atau surat. Potret atau gambar dan peta atau denah karena tidak memuat tanda-tanda bacaan atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan tetapi tidak mengandung suatu pikiran maka bukanlah termasuk alat bukti tulisan. Jika potret, gambar, peta atau denah diajukan juga dalam persidangan pengadilan, maka fungsinya hanyalah sekedar sebagai barang untuk menambah keyakinan saja bagi hakim.

2. Saksi

Pembuktian dengan saksi diatur dalam Pasal 168-172 HIR/306-309 RBG/1895-1912 KUHPperdata. Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal, jika hal itu tidak dikecualikan dalam Undang-Undang. (Pasal 168 HIR/1895 KUHPperdata). Keterangan seorang saksi saja dengan tidak ada suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercayai didalam hukum. (Pasal 169 HIR/306RBG/1905 KUHPperdata). Istilah hukumnya adalah *unus testis nullus testis* artinya satu saksi dianggap bukan saksi. Ini berarti suatu peristiwa dianggap tidak terbukti apabila hanya didasarkan dengan keterangan seorang saksi saja. Supaya peristiwa ini terbukti dengan sempurna menurut hukum, keterangan saksi tersebut harus dilengkapi dengan alat bukti lain, misalnya surat, persangkaan, pengakuan atau sumpah. Apabila alat bukti lain tidak ada, maka pembuktian akan dianggap sempurna jika ada dua orang saksi atau lebih. Namun demikian, meskipun ada dua orang saksi, suatu peristiwa

dapat dikatakan meyakinkan apabila hakim mempercayai saksi-saksi tersebut. Tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana mengetahui hal yang diterangkan. Pendapat-pendapat ataupun perkiraan khusus atau persangkaan/perasaan istimewa yang diperoleh melalui pikiran bukanlah kesaksian. (Pasal 171 HIR/308 RBG/1907 KUHPerdara). Jadi dalam kesaksian itu harus diterangkan pengetahuan saksi tentang peristiwa yang dialami sendiri dengan menyebutkan alasannya sampai ia mengetahui peristiwa tersebut. Dalam hal menimbang kualitas kesaksian tersebut, hakim harus benar-benar memperhatikan kecocokan antara seorang saksi dengan saksi lainnya. Kesesuaian kesaksian dengan keterangan yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang dipersengketakan, segala sebab yang mungkin ada pada saksi untuk mengemukakan perkara tersebut, perikehidupan, adat dan martabat seorang saksi, dan pada umumnya semua hal yang dapat menyebabkan saksi tersebut dapat dipercaya atau kurang dipercaya. (Pasal 172 HIR/309 RBG/1908 KUHPerdara).

3. Alat bukti persangkaan

Alat bukti persangkaan disebut juga al-qarinah. Qarinah menurut bahasa artinya "istri" atau "hubungan" , atau "pertalian", sedangkan menurut istilah hukum adalah hal-hal yang mempunyai hubungan atau pertalian yang erat sedemikian rupa terhadap sesuatu sehingga memberikan petunjuk. Tidak semua qarinah dapat dijadikan sebagai alat bukti karena hanya qarinah-qarinah yang jelas, yang diistilahkan dengan

al-qara'in al-wadihah. Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti, atau peristiwa yang dikenal, kearah suatu peristiwa yang belum terbukti. Yang menarik kesimpulan tersebut adalah hakim atau undang-undang. Menurut hukum acara perdata peradilan umum, persangkaan-persangkaan atau *vermoeden* dibagi atas dua macam, yaitu:

1. Persangkaan hakim
2. Persangkaan undang-undang

Persangkaan hakim adalah kesimpulan hakim yang ditarik atau sebagai hasil dari pemeriksaan sidang dan persangkaan undang-undang adalah kesimpulan yang ditarik oleh hakim yang mendasarkan undang-undang. Persangkaan hakim harus dan hanya memperhatikan hal-hal yang penting, teliti, tertentu, dan sesuai hubungan satu sama lainnya, Pengertian persangkaan hakim sesungguhnya amat luas. Segala peristiwa, keadaan dalam sidang, bahan-bahan yang didapat dari pemeriksaan perkara tersebut, kesemuanya itu dapat dijadikan bahan untuk menyusun persangkaan hakim, sedangkan persangkaan undang-undang ada yang memperbolehkan pembuktian lawan. Persangkaan itu merupakan kesimpulan saja, dalam hal ini yang dipakai sebagai alat bukti sebenarnya bukan persangkaan, melainkan alat-alat bukti lain, yaitu kesaksian atau surat-surat, atau pengakuan salah satu pihak, yang membuktikan bahwa suatu peristiwa adalah terang, baru kemudian disimpulkan adanya suatu peristiwa tertentu. Persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bebas, yaitu

terserah pada kebijaksanaan hakim, seberapa jauh hakim akan memberikan kekuatan bukti pada persengketaan yang didapat pada pemeriksaan perkara.

4. Alat bukti pengakuan

Alat bukti pengakuan di depan sidang merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat. Jadi, pihak lawan atau hakim tidak perlu membuktikan hal lain lagi, tetapi telah cukup untuk memutus dalam bidang persengketaan yang telah diakui tersebut. Adapun pengakuan yang tidak didepan sidang, hakim bebas untuk menilai, tidak mengikat dan bukan alat bukti yang sempurna, kecuali jika pengakuan diluar sidang dahulunya yang diulang ucapannya diluar sidang, sekalipun pengakuan di luar sidang dahulunya itu diberikan didepan orang yang kini sebagai hakim yang menyidangkan perkara. Pengakuan juga boleh dilakukan dengan tulisan atau isyarat (bagi yang bisu), jika jelas diketahui maksudnya. Pengakuan tertulis yang dibuat di luar sidang sama kekuatannya dengan pengakuan lisan di depan sidang dan tidak bisa dicabut kembali, kecuali dapat dibuktikan dan beralasan hukum, seperti karena adanya pemaksaan atau kekhilafan peristiwa atau ancaman. Ada tiga macam pengakuan yaitu:

1. Pengakuan murni (*aveupur et simple*), yaitu pengakuan yang sifatnya sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan.
2. Pengakuan dengan kualifikasi (*gequaliceerde bekentenis areu qualifie*), yaitu pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian tuntutan.

3. Pengakuan dengan klausula (*geclausu leered behentenis, aveu complexe*), yaitu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan.

Hukum acara perdata peradilan umum mensyaratkan bahwa pengakuan tidak boleh dipecah-pecah, kemudian sebagian diterima dan sebagian lainnya ditolak. Pengakuan harus bersifat murni tidak berklausala dan berkualifikasi. Pengakuan yang berklausala artinya pengakuan yang disertai tambahan yang bersifat membebaskan. Adapun pengakuan yang berkualifikasi artinya pengakuan yang disertai penyangkalan sebagian dari hal-hal yang dituntut. Pengakuan berklausala dan pengakuan berkualifikasi termasuk kategori pengakuan yang dipecah-pecah dan itu tidak dinilai sebagai pengakuan menurut acara perdata umum.

Menurut acara peradilan Islam, pengakuan dalam perkara zina atau tuduhan zina berlaku mengikat bagi pihak yang mengaku dan tidak berlaku bagi pihak yang tidak mengaku, sepanjang tentang hukum rajam atau hukum deranya, tetapi berlaku baik bagi pihak yang mengaku maupun pihak yang tidak mengaku berdasarkan akibat-akibat perzinahan.

5. Alat bukti sumpah

Dalam alat bukti sumpah terdapat macam-macam sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. Sumpah tambahan (*supletoir*) diatur dalam Pasal 155 HIR, 182 RBG dan 1940 BW

Sumpah tambahan disebut juga yamin al-istizhar atau menurut istilah peradilan umum disebut *suppletoire eed*, yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Ada perbedaan yang pokok antara istilah sumpah tambahan menurut peradilan umum (HIR/RBG/BW) dan sumpah tambahan menurut acara peradilan agama. Menurut peradilan umum, sumpah tambahan adalah sumpah yang diucapkan oleh salah satu pihak atas perintah hakim karena alat bukti minimal bagi hakim untuk memutuskan belum mencukupi, misalnya baru ada satu orang saksi saja. Adapun menurut acara peradilan agama, sumpah tambahan bukan berarti alat bukti minimal untuk dapatnya hakim dalam memutus, melainkan untuk menguatkan alat bukti minimal yang telah cukup. Oleh karena itu, walaupun dapat dibuktikan dalam kemudian hari bahwa sumpah tambahan tersebut palsu, ia sama sekali tidak dapat memengaruhi apa pun terhadap putusan yang telah diambil. Sumpah tambahan menurut peradilan Islam dapat juga diartikan sebagai sumpah yang diucapkan oleh pihak yang dituntut dalam hal pihak yang menuntut sudah tidak mampu membuktikan, yaitu sebagai penguat ketidakmampuan bukti dari pihak yang menuntut. Hal ini pun jika terbukti pada kemudian hari bahwa sumpah tambahan tersebut palsu, tidak mempengaruhi putusan yang diambil. Menurut peradilan umum, jika alat bukti minimal, bagi hakim untuk memutuskan telah cukup.

Hakim tidak boleh lagi memerintahkan pihak untuk mengucapkan sumpah tambahan tersebut.

2. Sumpah penaksiran memiliki kekuatan pembuktian, sumpah aestimatoir ini sama dengan sumpah supletoir, bersifat sempurna dan masih memungkinkan pembuktian lawan. Dalam acara peradilan agama, sumpah penaksiran belum didapat literturnya. Akan tetapi, apabila diperintahkan, sumpah penaksiran ini tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti sumpah. Sumpah ini diperintahkan oleh hakim untuk menetapkan harga barang atau kerugian yang dituntut karena hakim tidak menemukan jalan lain untuk menaksir kerugian atau harga barang tersebut.

3. Sumpah pemutus (*decisoir*) Pasal 15 HIR/Pasal 183RGB/Pasal 1930 BW

Sumpah pemutus menurut peradilan Islam diistilahkan dengan *yamin ala al bat*, sedangkan menurut peradilan umum diistilahkan dengan *decissoire eed*, yaitu sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya. Pihak yang meminta lawannya mengucapkan sumpah disebut deferent, sedangkan pihak yang harus bersumpah de laet. Di sini tidak ada alat bukti sama sekali yang mendukung tuntutananya. Sumpah pemutus harus bersifat litis decissoire (dalam peradilan umum) atau maqsurah mu'ayyanah (dalam peradilan Islam), artinya hanya terbatas (limitatif) tentang persengketaan tertentu

secara jelas. Contohnya, persengketaan tentang sudah atau belum dibayarnya maskawin yang dimintakan dalam sumpah pemutus hanyalah terbatas dalam soal "sudah atau belumnya maskawin dibayar", walaupun perkara tersebut, misalnya terdiri atas gugatan gabungan macam-macam.

4. Sumpah *Li'an*

Sumpah *li'an* ini tidak terdapat di peradilan umum, tetapi terdapat di peradilan agama/Islam karena sumbernya dari Al-Quran surat An-Nur (24) ayat 6-9. Maksud yang terkandung dalam ayat 6-7 adalah orang yang menuduh istrinya berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi harus bersumpah dengan nama Allah empat kali bahwa dia adalah benar dalam tuduhannya itu. Kemudian, dia bersumpah sekali lagi bahwa dia akan mendapat laknat Allah jika dia berdusta. Masalah ini dalam fiqh dikenal dengan *Li'an*. Adapun dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Pasal 87 dan 88 diatur tentang sumpah *li'an*, yaitu dimasukkan dalam judul pasal "cerai dengan alasan zina".

5. Sumpah *Qasamah*

Sumpah *Qasamah*, artinya sumpah yang dimintakan. *Qasamah*, artinya yang dimintakan kepada para wali dari tertuduh. Misalnya, ditemukan orang terbunuh di suatu tempat, tetapi tidak diketahui siapa pembunuhnya. Ahli waris dari orang yang terbunuh meminta agar 50

orang terkemuka dan taat agama di sekitar tempat kejadian untuk mengucapkan sumpah (*qasamah*) bahwa mereka tidak membunuhnya. Setelah sumpah *qasamah* diucapkan, penduduk setempat wajib membayar diyat, yaitu hukuman denda pengganti hukuman *qisas*.

B. Sengketa Pertanahan

1. Pengertian Sengketa Tanah

Kasus pertanahan merupakan sebuah hal yang sering dijumpai saat ini seiring dengan meningkatnya proses jual beli di masyarakat. Tak jarang kasus ini menimbulkan banyak kerugian bagi banyak pihak, baik itu kerugian materil maupun imateril. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, kasus pertanahan diartikan sengketa, konflik atau perkara pertanahan yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau kebijakan pertanahan nasional. Dalam hal kasus pertanahan, perlu dibedakan antara sengketa pertanahan dan konflik pertanahan. Adapun pengertian dari 2 terminologi tersebut adalah sebagai berikut:

A. Sengketa Pertanahan

Sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas

secara sosio-politik. Dalam kehidupan masyarakat, sengketa tanah ini sering terjadi dalam hal peralihan hak atas tanah seperti jual beli tanah, pembagian tanah warisan, hibah ataupun perbuatan hukum lainnya yang berkaitan langsung dengan tanah. Sengketa ini pada umumnya hanya berdampak pada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam sengketa (tidak berdampak secara sosio-politis). Sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana terkait dengan pemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan dan sengketa hak ulayat.

B. Konflik Pertanahan

Konflik pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas, secara sosio-politis. Pengertian ini hampir sama dengan apa yang dimaksud dengan sengketa pertanahan, hanya saja dampak yang diakibatkan lebih luas, yaitu tidak hanya pada pihak yang langsung bersangkutan melainkan kepada pihak-pihak yang lainnya. Contoh dari konflik pertanahan sendiri sering terjadi dalam hal pembukaan hutan adat sebagai lahan perkebunan.

2. Sebab-Sebab Sengketa Tanah

1. Tumpang tindihnya penerbitan surat keputusan dari instansi yang berhubungan langsung dengan pertanahan. Lembaga yang berwenang

mengeluarkan surat tanah yang dinamakan sertifikat adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Normatifnya jika sebidang tanah sudah dikeluarkan satu sertifikat, tentunya tidak bisa dikeluarkan sertifikat yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Diterbitkannya sertifikat kedua, ketiga dan seterusnya, atas permintaan masyarakat dengan alasan sertifikat yang pertama hilang, banjir, kebakaran, atau rusak dan sebagainya. Prosedur dan proses pembuatan sertifikat yang kedua dan ketiga, yang tidak valid mengakibatkan setelah dikeluarkan sertifikat kedua dan seterusnya, ternyata sertifikat yang pertama masih ada. Maka terjadilah satu bidang tanah terdapat dua atau lebih sertifikat atau di masyarakat dinamakan tanah sengketa. Model semacam ini sengketa antara individu dengan individu dan penyelesaiannya memang bisa secara individu. Tujuan penyelesaian ini harus memberlakukan satu sertifikat terhadap sebidang tanah dan tidak memberlakukan sertifikat yang lain, sedangkan sertifikat yang lain dianggap tidak berlaku.

2. Sengketa kepemilikan tanah bisa terjadi sebagaimana bentuk segitiga sama sisi. Sisi pertama individu, sisi kedua lembaga swasta, dan sisi ketiga pemerintah. Kasus seperti ini sering terjadi pada tanah dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, pihak individu sebagai pemilik tanah yang awal, pihak pemerintah mengeluarkan surat keputusan HGU, HGB, pihak lembaga sebagai pemegang hak. Idealnya ketiga sisi duduk bersama menyelesaikan permasalahan. Sebagai contoh perselisihan

semacam itu pernah terjadi di Mesuji, Lampung, akibatnya terjadi korban jiwa.

3. Hasil ukur tidak akurat yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih tanah maupun batas tanah. Selama ini hasil ukur lebih mengandalkan hasil ukur manual, dengan peralatan manual, yang hasilnya kadangkala tidak akurat. Hasil ukur yang akurat sebetulnya harus menunjukkan luas dan letak tanah dengan menyebutkan garis bujur dan lintang, seandainya tanahnya tertimbun sebagaimana tsunami Aceh, akan mudah untuk dicari letaknya sekaligus luasnya. Dalam pengukuran massal, masih terdapat hasil ukur dari beberapa bidang tanah di plot (disatukan) dalam satu blok, antara luas blok dengan jumlah luas tanah yang disatukan tidak sinkron, terjadi tumpang tindih batas antara satu bidang tanah dengan bidang lainnya.
4. Tidak adanya lembaga pembina/koordinator penyelesaian pertanahan. Masih terjadi multi kewenangan, seperti untuk perizinan penambangan masih membutuhkan rekomendasi dari beberapa instansi tingkat kementerian.
5. Penyebab sengketa tanah akibat alam seperti terjadinya bencana alam, yang menyebabkan surat-surat tanah hilang, rusak, termasuk dokumen yang ada di pemerintahan, sebagaimana yang pernah terjadi di Aceh, menurut informasi sekitar 40% data tanah rusak/hilang.
6. Ketentuan yang sulit diaplikasikan. Sebagai ketentuan tentang pertanahan tidak aplikabel atau sulit untuk diaplikasikan, hal ini menjadi penyebab

terjadinya permasalahan pertanahan. Pembuat ketentuan baik legislatif maupun eksekutif dalam menyusun ketentuan sering tidak memikirkan aspek aplikasibelitas dan fleksibelitas, akibatnya hasil rumusan ketentuan yang dibuatnya sulit untuk diterapkan.

7. Data yang kurang akurat dan kurang lengkap. Idealnya database pertanahan yang ada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN harus valid. Jika perdataan benar valid, tidak akan mungkin terjadi adanya sertifikat ganda. Seharusnya BPN sebagai sumber data harus ada penyuplai data dan yang berperan sebagai penyuplai data adalah masyarakat. Data dari masyarakat yang ada selama ini lebih meningkatkan kepada yang diperoleh dari masyarakat yang mengurus pendaftaran tanah atau membuat sertifikat, sedangkan masyarakat yang belum pernah mengurus pendaftaran tanah sangat dimungkinkan tidak ada. Hal ini yang menyebabkan lemah data pertanahan di Indonesia.

3. Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Penyelesaian sengketa ada dua macam, yang pertama penyelesaian sengketa dengan litigasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa, termasuk penyelesaian sengketa tanah sudah pasti akan lebih baik mengutamakan pencegahan (*preventif*) daripada menyelesaikan (*represif*), artinya untuk mencegah agar kita tidak terjerumus pada tanah sengketa, setiap akan mengadakan pembelian atau peralihan hak atas tanah, harus selektif, dengan mengecek kebenaran hak kepemilikan tanah pada kantor pemerintah, baik BPN maupun di Pemda pada satuan unit

yang memiliki tugas pokok dan fungsi menangani tanah. Namun, ada saja kemungkinan dalam pengecekan status tanah ada yang tidak akurat, artinya tidak menemukan tanah yang sebenarnya, sehingga kita dapat terjerumus dengan membeli kepemilikan tanah yang sengketa. Jika sudah demikian mau tidak mau harus berusaha menyelesaikannya. Pemerintah memiliki tugas pokok untuk mencegah terjadinya tumpang tindih atau permasalahan pertanahan yang lainnya. Usaha pencegahan ini diantaranya dengan ketegasan memberlakukan ketentuan dalam penerapan hukum pertanahan. Pengadilan merupakan wadah untuk mencari keadilan pada semua permasalahan perselisihan hukum, termasuk perselisihan pertanahan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pengadilan tidak bisa menolak semua gugatan yang diajukan oleh para pihak dengan alasan apapun. Jalur untuk menyelesaikan sengketa melalui litigasi bisa menempuh:

1. Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) pada tingkat Kabupaten/Kota setempat. Yang menjadi kewenangan pengadilan umum ini apabila dalam proses pembuatan surat sertifikat tanah terdapat indikasi perbuatan pelanggaran terhadap hukum yang diberlakukan oleh para pihak maupun pihak pemerintah yang memproses surat tanah atau sertifikat, hal itu sebagai syarat untuk menyelesaikan di pengadilan umum. Semua sengketa yang diajukan di pengadilan umum harus ada pihak pelapor (penggugat) dan pihak terlapor (tergugat). Jika kesalahan dilakukan oleh pemerintah atau BPN, maka pihak tergugat adalah BPN.

2. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), apabila ternyata dalam proses pembuatan surat kepemilikan hak atas tanah termasuk sertifikat terdapat kesalahan penerapan hukum, artinya menerapkan hukum yang seharusnya tidak harus diterapkan akan tetapi diterapkan. Salahnya penerapan hukum merupakan suatu persyaratan untuk berperkara menjadi ranahnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), agar dapat di proses harus ada pihak pelapor (penggugat) dan terlapor (pemerintah). Ranah yang termasuk dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah sengketa tata usaha negara, yang timbul dalam tata usaha negara antara seseorang dengan badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya putusan tata usaha negara (keputusan pemerintah). Untuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) lebih menitik bertakan dalam aspek penerapan hukumnya, artinya apabila ternyata permasalahan lebih didominasi karena kesalahan penerapan hukum, maka lembaga yang lebih kompeten akan lebih tepat pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara bisa memberikan putusan pencabutan surat pencabutan tata usaha negara atau pejabat negara, apabila dinyatakan dalam proses pembuatan surat keputusan dan adanya penyimpangan penerapan hukum, atau lembaga pemerintahan yang mengeluarkan keputusan diharuskan mengeluarkan keputusan yang baru. Kelemahan pada PTUN tidak memiliki lembaga eksekutor (lembaga pelaksana keputusan), hal ini bisa mengakibatkan putusan PTUN akan memakan waktu yang tidak terbatas bila dilaksanakan. Apabila kesalahan tersebut bukan kesalahan penerapan

hukum, tetapi kesalahan prosedur, maka PTUN tidak memiliki kompetensi mengadili maka jalurnya menjadi kewenangan pengadilan umum pada tingkat Pengadilan Negeri di Kabupaten/Kota. Antara kewenangan PTUN dengan Pengadilan Umum tidak bisa dicampur adukan, artinya bila memang kewenangan PTUN, maka Pengadilan Umum tidak dapat mengadilinya, begitu pula sebaliknya. Bila kasus ini bersifat privat/perdata yang diajukan di Pengadilan Umum, harus didahului dengan adanya gugatan oleh salah satu pihak. Isi gugatan tersebut bisa bermacam-macam tuntutan tergantung penggugat, seperti permohonan agar sertifikat dicabut, tuntutan ganti rugi bisa berupa materil dan non materil dan sebagainya. Jika kasus tersebut terdapat unsur pidana, jalur yang harus ditemlüh berbeda melalui kepolisian, kejaksaan, Pengadilan.

Kedua, penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu sebagai berikut:

1. Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Ini berarti dalam konsultasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa, peran konsultan dalam menyelesaikan perselisihan yang ada tidak dominan sama sekali, hanyalah memberikan pendapat (hukum), sebagaimana yang diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri

oleh para pihak, meskipun adakalanya pihak konsultan diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

2. Negosiasi

Negosiasi adalah penyelesaian sengketa melalui kompromi antara pihak-pihak yang bersengketa, tanpa mengundang kehadiran pihak ketiga sebagai penengah untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara mereka. Istilah negosiasi tercantum dalam Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa (alternatif disputes resolution) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, dalam praktik yakni penyelesaian dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi atau penilaian para ahli. Pengertian negosiasi dapat berbeda-beda tergantung siapa saja yang terlibat dalam suatu negosiasi. Dalam hal ini, ada dua pihak yang berkepentingan dalam bernegosiasi, negosiasi dapat didefinisikan sebagai pembicaraan dengan orang lain dengan maksud untuk mencapai kompromi atau kesepakatan untuk mengatur atau mengemukakan. Istilah lain kerap diterapkan dalam proses seperti tawar-menawar, perundingan, perantaraan, atau barter. Negosiasi merupakan perundingan dua arah, ketika setiap pihak ingin menyampaikan keinginannya masing-masing. Negosiasi adalah proses upaya untuk mencapai suatu kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan proses yang dinamis dan beranekaragam. Dengan kata lain, negosiasi

adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu keadaan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

3. Mediasi

Mediasi merupakan model penyelesaian sengketa melalui kesepakatan antara pihak-pihak untuk melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa walaupun hanya berfungsi sebagai penengah yang bersifat pasif, karena inisiatif untuk mengambil keputusan sebagai wujud penyelesaian sengketanya tetap didasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa. Untuk mencapai penyelesaian sengketa dengan prinsip *win-win solution* maka salah satu caranya adalah dengan melakukan mediasi.²⁵ Yang menjadi kelemahan satu-satunya yang ada pada saat proses mediasi terletak pada kekuatan eksekusi para pihak setelah mencapai kesepakatan. Karena kesepakatan dicapai dengan cara suka rela, maka eksekusi atau kesepakatan itu juga harus dengan kondisi suka rela pula. Oleh karena itu proses mediasi akan efektif bila para pihak benar-benar secara sukarela menghendaki perselisihan diselesaikan dengan cara mediasi. Dengan demikian, mengandung kosekuensi bahwa mediator serta hal-hal ini selama mediasi pun tetap secara sukarela harus diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

4. Arbitrase

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar

²⁵ Cahya Wulandari, *Kebijakan Nonpenal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2013), 8.

peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Kelebihan alternatif penyelesaian sengketa ini adalah penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase diantaranya, yaitu adanya jaminan kerahasiaan sengketa para pihak, dapat dihindarkan keterlambatan karena adanya hal prosedural dan administratif, para pihak dapat memilih hukum apa yang diterapkan untuk penyelesaian masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraannya arbitrase. Sedangkan yang menjadi kelemahannya adalah lembaga arbitrase tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan kepastian hukum terhadap kesepakatan yang telah dihasilkan.

5. Pemberian Pendapat Hukum

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa pendapat para ahli sebagai alternatif penyelesaian sengketa, dan bahwa ternyata arbitrase dalam suatu bentuk kelembagaan, tidak hanya bertugas menyelesaikan perbedaan atau perselisihan pendapat maupun sengketa yang terjadi antara para pihak dalam suatu perjanjian pokok, melainkan juga memberikan konsultasi dalam bentuk opini atau pendapat hukum dari setiap para pihak yang memerlukannya tidak terbatas pada para pihak dalam perjanjian. Pemberian opini atau pendapat hukum tersebut dapat merupakan suatu masukan bagi para pihak dalam menyusun atau membuat perjanjian yang akan mengatur setiap hal-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, maupun dalam memberikan penafsiran ataupun pendapat terhadap salah satu atau lebih ketentuan dalam

perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak untuk memperjelas pelaksanaannya. Jika dilihat dari sifat dan pendapat hukum yang diberikan secara hukum mengikat dan merupakan pendapat pada tingkat akhir, dapat dikatakan bahwa sebenarnya sifat pendapat hukum yang diberikan oleh lembaga arbitrase ini termasuk dalam pengertian atau bentuk putusan lembaga arbitrase.

C. Kajian Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh siyasah

Kata fiqh berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian fiqh adalah "paham yang mendalam". Imam Al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin menyebut "fiqh tentang sesuatu" berarti kurang mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Kata "*Faqaha*" diungkapkan dalam Al-Quran sebanyak 20 kali. 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian "kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya". Berbeda dari ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath'i*), fiqh merupakan "ilmu" tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut istilah fiqh adalah "ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci".

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga dengan hukum Islam. Karna beraifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum syara

tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Disamping mencakup pembahasan tentang hubungan manusia dengan tuhan (ibadahnya), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (*muamalah*). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawaris* (kewarisan), *mura'faat* (hukum acara), *siyasah* (politik/ ketatanegaraan) dan *al-ahkam al-dualiyah* (hubungan internasional).

Dari gambaran tersebut jelaslah bahwa fiqh siyasah adalah bagian dari pemahaman ulama *mujtahid* tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan. Kata siyasah yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan politik, dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Secara terminologis Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah "peraturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan".²⁶

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan

²⁶ Abdul wahab khallaf, *al siyasah al syar'iyah*, (kairo: Dar al azhar, 1977). 4-5.

pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Menurut Imam Al-Mawardi, didalam kitabnya yang berjudul *al-ahkam al-sulthaniyyah*, ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qodha'iyyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang) dan *siyasah idariyyah* (administrasi negara). Adapun Imam Ibn Taimiyyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyasah qodha'iyyah* (peradilan), *siyasah idariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), dan *siyasah dauliyyah/ kharijiyyah* (hubungan internasional). Sementara Abd Al-Wahab Khallaf didalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* lebih memperkecilnya menjadi tiga bagian bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara. Berbeda dengan tiga pemikir diatas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddienqy membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu²⁷ :

1. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah* (Politik Pembuatan Perundang-Undangan)
2. *Siyasah Tasyriiyyah Syar'iyyah* (Politik Hukum)
3. *Siyasah Qodha'iyyah Syar'iyyah* (Politik Peradilan)

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: PrenadaMedia 2016), 14-15.

4. *Siyasah Maliyyah Syar'iiyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
5. *Siyasah Idariyyah Syar'iiyyah* (Politik Administrasi Negara)
6. *Siyasah Dauliyyah/ Siyasah Kharijiyyah Syar'iiyyah* (Politik Hubungan Internasional)
7. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iiyyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan)
8. *Siyasah Harbiyyah Syar'iiyyah* (Politik Peperangan)

Berdasarkan perbedaan pendapat terkait pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama, politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*) bagian ini meliputi kajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iiyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qodha'iiyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua, politik luar negeri (*siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah*) bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khashsh*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara Muslim dengan negara non-Muslim (*al-siyasah al-duali al-amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga negara Muslim dengan warga negara lain. Apapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan negara Islam dalam masa damai dan perang.

3. Pembahasan Siyasah Qodha'iyyah

Lembaga peradilan dalam fiqh siyasah dikenal dengan Qodha'iyyah yang berasal dari kata *al-qadha* yaitu lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Menurut ilmu bahasa arti *qodha* antara lain menyelesaikan, menunaikan dan memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan. Sedangkan dari segi istilah ahli fiqh, *qodha* berarti lembaga hukum dan perkataan yang diucapkan oleh seseorang yang memiliki wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya.

Menurut Muhammad Salam Madkur, *qodha* disebut hukum karena ia melarang pelaku perbuatan tidak adil karena adanya berbagai pengertian dari kata *qodha*, maka ia dapat digunakan dalam arti memutuskan perselisihan oleh hakim. Orang yang melakukannya disebut *qadhi*. Menurut ulama ahli fiqh, terminologi syariat dari kata *qodha* adalah memutuskan perselisihan dan menghindarkan perbedaan serta konflik-konflik. Dengan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa tugas *qadha* (lembaga peradilan) adalah menampakan hukum agama, bukan menetapkan suatu hukum. Hakim hanya menerapkannya ke alam nyata, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada.

Islam telah mensyariatkan adanya tiga kategori peradilan, sesuai dengan objek masing-masing. *Qodha khulshumat* (peradilan sengketa), yang mengadili sengketa di tengah masyarakat. Disana ada pihak penuntut, yang

menuntut haknya, dan terdakwa sebagai pihak yang dituntut. Peradilan ini membutuhkan mahkamah (ruang sidang). Sedangkan *Qodha Hisbah*, yang mengadili pelanggaran hukum syara' di luar mahkamah, bukan karena tuntutan pihak penuntut, tetapi semata-mata karena pelanggaran. Seperti pelanggaran lalu lintas, parkir di jalan raya, penimbunan barang, penipuan harga (*ghabn*) dan barang (*tadlis*), dan lain-lain. Adapun *Qodha madzalim*, yang mengadili sengketa rakyat dengan negara, dan atau penyimpangan negara, dan atau penyimpangan negara terhadap konstitusi dan hukum.²⁸ *Qodha'iyyah* disyari'atkan Allah dalam firmanNya QS. Shaad Ayat 26 dan Al-Maidah Ayat 49:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَظْلُمُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya : “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (QS. Shaad Ayat 26)

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya: “Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah

²⁸Ahmad Sudirman, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Sengketa Pemilu”, (Skripsi, UIN Raden Intan, 2020), 21

diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.” (Al-Maidah Ayat 49)

Karena kedudukannya yang penting dan strategis, maka Islam tidak hanya mengatur mekanisme peradilanannya, tetapi juga memberikan berbagai kriteria yang ketat untuk menjadi seorang *qodhi*. Menurut Al-Mawardi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *qodhi* (hakim) yaitu laki-laki, berakal, memiliki kecerdasan yang dapat menjauhkan dirinya dari sebuah kelalaian, merdeka, adil, sehat pendengaran dan penglihatan dan memiliki pengetahuan yang luas tentang syariah. Jabatan hakim adalah kedudukan yang berada dibawah khalifah.²⁹ Yaitu sebuah lembaga yang tersedia untuk tujuan menyelesaikan gugatan serta memutuskan perselisihan dan pertikaian. Oleh karena itu, jabatan hakim pada hakikatnya merupakan bagian dari tugas kekhalifahan tetapi, untuk meringankan tugasnya yang sangat banyak, maka seorang khalifah boleh atau berwenang mengangkat seorang *qodhi* yang secara khusus menangani tugas peradilan. Karena itulah jabatan *qodhi* berada langsung di bawah khalifah. Artinya, khalifah sendiri yang bertugas mengawasinya, sehingga lembaga peradilan yang terdiri dari para *qodhi* bertanggung jawab langsung kepada khalifah. Bahkan apabila para *qodhi* yang berada dalam lembaga peradilan tersebut tidak menyelesaikan suatu persoalan, maka khalifah sendirilah yang langsung

²⁹ M. Zakaria, “Peradilan dalam Politik Islam (*Al Qodhaiyyah Fis Siyashah Assar’iyyah*)”, Vol.01 (HUKUMAH, 2017), <https://ojs.staituankutambusai.ac.id>.

menanganinya. Hal inilah yang terjadi pada awal permulaan Islam, yaitu para khalifah melaksanakan sendiri jabatan *qodhi*.

Islam telah menetapkan mekanisme yang tegas dan jelas terkait dengan tugas seorang *qodhi*. Pertama, Islam memberikan jabatan tersebut hanya kepada mereka yang layak dan ahli takwa, sebagaimana kriteria yang dijelaskan diatas. Kedua, Islam melarang mereka menyibukkan diri dalam aktivitas yang bisa melalaikan tugasnya. Ketiga, Islam juga melarang mereka menerima hadiah, hibah dan sejenisnya dari mereka yang mempunyai kepentingan dari jabatannya. Keempat, Islam telah menetapkan gaji yang lebih dari cukup, sebagaimana yang ditetapkan Umar bagi pada *qodhinya*, agar bisa berkonsentrasi pada tugasnya dan tidak tergoda dengan materi yang ditawarkan kepadanya. Kelima, Islam menetapkan akhlak para *qodhi*, antara lain harus berwibawa, menjaga *murū'ah* (harga diri), tidak banyak berinteraksi dengan orang lain, senda gurau dengan mereka, menjaga ucapan dan tindakannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. ke-6, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- AS, Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004
- Ashshofa, Burhan, *Metedologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineke Cipta, 2013.
- Arief, M. Isa, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Jakarta : Intermasa, 1986.
- Bakhri, Syaiful, *Dinamika Hukum Pembuktian : Dalam Capaian Keadilan*, Cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo, 2018.
- Cholid, Narbuko dan Abu Achmadi, *Metedologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Hajati Sri, dkk., *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, Airlangga University Press, 2017.
- Hamzah, Andi dan Bambang Waluyo, *Delik-Delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt Of Court)*, Cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1989.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agrarian Indonesia: Sejarah Pembentukan Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, Jakarta: Djambatan, 1994.
- Iskandarsyah, Mudakir, *Panduan Mengurus Sertifikat dan Menyelesaikan Sengketa Tanah*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019.
- Khaliq, Farid Abdul, *Fiqh Politik Islam*, Cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2005.
- Murad, Rusmadi, *Administrasi Pertanahan Pelaksanaan dalam Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Mapplasse, Syarif, *Logika Hukum Putusan Hakim*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Ngani, Nico, *Metedologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, Jakarta: Amzah, 2020
- Suandra, I Wayan, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 1994.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Alumni, 1979.
- Suharso dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Kaerya, 2011.
- Sunggono, Bambang, *Metedologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Syamsudin dan Salman Luthan, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Cet. ke-1, Jakarta : Kencana, 2018.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Cet. ke-7, Bandung : Sumur Bandung, 1978.

Pramukti, Angger Sigit dan Erdha Widayanto, *Tanah Sengketa: Panduan Mengurus Peralihan Hak Atas Tanah Secara Aman*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.

Waskito dan Hadi Arnowo, *Pertanian, Agraria dan Tata Ruang*, Cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2018.

Wijayanta, Tata dan Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*, Cet.ke-1, Yogyakarta: Medpress Digital, 2013.

B. Jurnal dan Skripsi

M. Zakaria, Peradilan Dalam Politik Islam (Al Qadhaiyyah Fis Siyasah Assyar'iyah), *Jurnal Hukumah* Vol.01 No. 1, Desember 2017.

Ummaya, Firman Syah, Kekuatan Pembuktian Suray Wasiat Menurut Pasal 875 KUHPdata *Jurnal Lex Privatum*, Vol.6 No.8, Oktober 2018.

Pansariang, Juosfiel Sadpri, Proses dan Syarat Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.3 No.3, Oktober 2014.

Sakti, Trie, Putusan Hakim yang Berkaitan dengan Kasus Pertanahan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional, 2004, <https://osf.io/gms8q/download>.

Eko Mulyono, Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Putusan NO.1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg, *Skripsi : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga*, 2017.

Muh. Arham Latif, Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks, *Skripsi: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar*, 2017.

Mariyah AL Qibthiyah, Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara NO. 09/PDT.G/2010/PN.SGT Tahun 2010 Mengenai Kasus Sengketa Tanah Di Pengadilan Negeri SungaiLiat (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sungailiat), *Skripsi: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung Bahunijuk*, 2017.

Ahmad Sudirman, Analisis Siyasah Qodhaiyyah Tehadap Peran dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu, *Skripsi: Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2020.

C. Undang-Undang

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.

Pasal 4 Undang-Undang No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Pasal 1963 Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 610 KUHPdata Tentang Perolehan Hak Milik.

Pasal 1365 Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 181 HIR Tentang Pembayaran Biaya Perkara di Pengadilan.